

KEMISKINAN DI PERKOTAAN (STUDI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PALANGKA RAYA)

Alfrid Sentosa

Program Studi Ilmu Politik, Universitas PGRI Palangka Raya
(email: afrael09@gmail.com)

Wijoko Lestario

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya
(email: lestarionowijoko@gmail.com)

Kur Junaidi

Program Studi Sosiologi, Universitas PGRI Palangka Raya
(email: kurjunaidiupp@gmail.com)

Abstrak

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah kualitatif naratif. Di mana peneliti langsung masuk ke dalam lingkup, melihat dan mencermati kondisi sosial yang nyata dan tepat dari apa yang terjadi di masyarakat. Alat uji yang diteliti adalah masyarakat kota Palangka Raya khususnya penerima bantuan atau penerima bantuan p2kp. Dalam menempuh pendekatan kajian selama ini, yang akan muncul yang akan saya dapatkan adalah temuan dan tanggapan serta tanggapan dari manusia. Apa yang akan terlihat pada target yang akan diterima dalam penelitian ini adalah berbagai tanggapan dan masukan dari masyarakat, salah satunya dalam memfasilitasi dan menawarkan bantuan kepada orang-orang dari bkm untuk lebih jelas dan lebih terbuka dalam topik moneter. Dan gunakan anggaran yang didapat. Hal ini diupayakan agar unsur kkn tidak tampak.

Keyword : *Kemiskinan, Ekonomi Masyarakat*

Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang dasar 1945, dimana tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹ Dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan, pembangunan nasional sebagaimana digariskan undang-undang, merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam meningkatkan segi

¹ Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), h. 39.

kehidupan bangsa, berupa pembangunan fisik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, dan ideologi. Pembangunan nasional merupakan dasar untuk dapat terciptanya masyarakat yang mandiri.

Masalah kemiskinan bukanlah sekedar masalah ekonomi atau konsumsi, namun juga masalah politik. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan.

Kemiskinan merupakan masalah global, yang sering dihubungkan dengan masalah kebutuhan, kesulitan dan kekurangan berbagai keadaan hidup. Sebagian orang ada yang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Kemiskinan dapat dipahami sebagai situasi dimana kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Serta gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

Oleh karena itu, kemiskinan terutama yang diderita oleh fakir miskin merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan fakir miskin merupakan salah satu upaya strategi nasional dalam mewujudkan sistem

ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.²

Di Indonesia orang melihat kehidupan rata-rata suku bangsa Cina lebih baik secara ekonomi daripada suku lain di Indonesia, karena orang Cina lebih dianggap pekerja yang memiliki etos kerja yang tinggi di samping mereka dikenal sebagai suku bangsa yang amat hemat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebaliknya orang melihat bahwasanya penduduk asli Indonesia kebanyakan miskin karena malas dan hidup sangat konsumtif.³

Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat terutama pada mereka yang tinggal di perkotaan, sering diartikan sebagai akibat dari kebodohan, kurangnya keterampilan teknis, etos kerja yang tumpul, kesempatan kerja yang rendah sehingga sering dihubungkan dengan ketidakberdayaan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, bila kita pahami secara mendalam, maka kemiskinan bukan semata-mata akibat dari ketidakberdayaan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi berkaitan dengan masalah struktur-sosial dan cenderung sudah menjadi paradigma dan “budaya” pada masyarakat itu sendiri. Kemiskinan pada masyarakat kita ini kadang kala merupakan sebuah paradigma dan tradisi, ada ungkapan apabila, orangtuanya sudah miskin. Maka, anak dan cucunya akan ikut pula menjadi miskin.

² Harry Hikmat, dkk, Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Program Pemberdayaan Fakir Miskin tahun 2006-2010 (Jakarta:Departemen Sosial RI, 2005), h. 10.

³ Loekman Soetrisna, Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h. 16.

Masalah kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun dalam penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga menjadi luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Bila, kemiskinan dikaitkan dengan ketidakberdayaan, pengentasan kemiskinan yang memiliki proses pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu yang mustahil. Dengan kata lain, kemiskinan dan ketidakberdayaan merupakan dua sisi dari sebuah mata uang logam.⁴

Sebagaimana kita ketahui, tujuan utama pembangunan masyarakat adalah peningkatan taraf hidup. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka pembangunan masyarakat tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menuntut pemecahan masalah. Pembangunan masyarakat diharapkan mampu dan tampil sebagai salah satu alternatif untuk melakukan upaya pemecahan masalah dan perbaikan kondisi tersebut.

Dengan membandingkan jumlah penduduk yang berada dibawah Standar hidup rata-rata, yang digunakan sebagai indikator pada suatu periode sebelum dan

sesudah proses pembangunan, maka dapat diketahui keberhasilan dari proses tersebut dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Walaupun demikian, prakteknya ternyata tidak sesederhana itu. Apabila dalam perbandingan dilakukan antar dua kondisi yang mempunyai rentang waktu yang cukup panjang dan tuntutan kebutuhan hidup juga yang semakin meningkat sebagai akibat sosial ekonomi yang telah terjadi, maka standar yang dipakai dianggap sudah tidak memadai lagi. Walau menggunakan standar yang lama dapat diketahui semakin banyak warga masyarakat yang sudah keluar dari kondisi kemiskinan, akan tetapi dilihat dari tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang, kondisi tersebut tetap dirasakan sebagai masih berada dalam keadaan miskin. Permasalahan yang sama akan dijumpai apabila memperhatikan stratifikasi sosial yang ada, dimana walaupun lapisan bawah telah meningkatkan taraf hidupnya, akan tetapi apabila peningkatan itu dibandingkan dengan yang dialami oleh lapisan lain atau setingkat lebih tinggi maka, masih jauh lebih rendah, dan secara relatif masih merasakan kondisinya yang tetap miskin.

Berbagai bentuk lingkaran dan mata rantainya dapat direkonstruksi dari proses kemiskinan itu. Dari sudut ekonomi misalnya, dapat dikatakan bahwa karena kondisi kemiskinan, maka pendapatan hanya cukup, bahkan tidak jarang kurang mencukupi memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari. Dengan demikian sulit diharapkan adanya kemampuan untuk menabung. Tidak adanya tabungan mengakibatkan tidak adanya investasi jangka panjang, sehingga produktivitas tetap rendah. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan dan tetap bertahannya dari kondisi kemiskinan tersebut. Dari sisi lain, lingkaran

⁴ Heru Nugroho, Menumbuhkan ide – ide kritis, cet ke-2. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), h. 44-45.

kemiskinan dapat terbentuk dari rendahnya gizi dan nutrisi. Dalam hal ini, kondisi kemiskinan dapat membentuk mata rantai : rendahnya nilai gizi dan nutrisi dalam konsumsi pangan—derajat kesehatan rendah—produktivitas kerja rendah—pendapatan rendah—kemiskinan.⁵

Kemiskinan juga sesuatu yang nyata dalam masyarakat bagi mereka yang tergolong tidak miskin, dari hasil pengamatan baik secara sadar maupun tidak sadar, mengenai berbagai gejala sosial yang terwujud dalam masyarakat. Kesadaran akan adanya kemiskinan bagi mereka yang tidak miskin biasanya terwujud pada saat mereka membandingkan keadaan mereka dengan masyarakat yang tingkat kehidupan sosialnya lebih tinggi dari kehidupan yang mereka miliki.

Dari pemikiran—pemikiran dan diskusi—diskusi yang diadakan tentang kemiskinan lebih banyak menekankan segi—segi emosional dan perasaan yang diliputi aspek—aspek moral dan kemanusiaan, atau juga bersifat partisan karena berkaitan dengan alokasi sumber daya. Sehingga, pengertian tentang hakikat kemiskinan itu sendiri menjadi kabur. Akibatnya berbagai usaha penanggulangan masalah kemiskinan dijabarkan sebagian—sebagian sehingga kurang memenuhi sasaran secara tepat.

Secara singkat kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah : yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung positif

pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.⁶

Dengan demikian, menjadi miskin dirasakan telah mengalami degradasi dan seringkali tidak merupakan lapisan yang terpilih dalam hidup bertetangga dan berteman. Kondisi ini disadari oleh masyarakat miskin itu sendiri dan mereka mendefinisikan dunianya sebagai kelompok yang gagal, kelompok yang terlempar dari lingkungannya. Kesadaran semacam ini sering menimbulkan sikap yang apatis. Dan menganggap bahwa dirinya lemah, tidak mempunyai kekuatan dalam melakukan hal—hal yang akibatnya sampai pada kesadaran bahwa mereka tidak mampu menguasai nasibnya sendiri karena lebih ditentukan orang lain.⁷

Miskin bukanlah keinginan setiap insan manusia, tetapi karena nasib dan mungkin karena usaha yang belum maksimal, yang menjadikan mereka seperti itu. Tetapi semua itu kembali pada diri sendiri, apakah setiap manusia dapat menerimanya dengan tulus nasib yang telah digariskan kepada mereka dan memperbaiki keadaannya dengan berusaha lebih giat lagi serta mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan meningkatkan kadar iman atau melakukan hal yang sebaliknya.

Dalam UUD 1945 khususnya Pasal 34 mengamanatkan bahwa “fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara” (ayat 1), dan “negara berkewajiban menangani fakir miskin melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial” (ayat 3). Selanjutnya komitmen nasional dalam pemberdayaan fakir miskin

⁵ Soetomo, Masalah Sosial dan Pembangunan, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 116-120.

⁶ Parsudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), h. 12.

⁷ Soetomo, Masalah Sosial dan Pembangunan, h. 122.

dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 124 tahun 2001 jo. Nomor 8 tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan; dengan tujuan meningkatkan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik sektor, pemerintahan daerah, masyarakat maupun dunia usaha dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, tidak hanya saja memberikan dana bantuan maupun pemberdayaan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Akan tetapi memberikan motivasi dan semangat akan pentingnya gotong royong serta peningkatan spiritual keagamaan didalam masyarakat itu sendiri. Dalam perkembangannya, selain masyarakat dapat mampu memberdayakan diri mereka sendiri dalam bidang kebutuhan ekonomi, diharapkan masyarakat juga mampu meningkatkan spiritual keagamaan yang sudah ada.

Puncak dari upaya mengedepankan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia, baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang, adalah lahirnya kesepakatan kepala negara dan kepala pemerintahan 189 negara mengenai Deklarasi Milenium. Deklarasi ini berisikan kesepakatan negara-negara tentang arah pembangunan berikut sasaran-sasaran yang perlu diwujudkan. Secara ringkas, arah pembangunan yang disepakati secara global meliputi: (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; (3) mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan maternal; (6) melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkulosa); (7) menjamin

keberlangsungan lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.⁸

Sejak pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kewenangan otonom yang dimiliki daerah, melekat pula kewenangan dan sekaligus tanggung jawab untuk secara pro-aktif mengupayakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam dasawarsa sekarang ini, perkotaan telah menjadi perhatian berbagai kalangan karena menyimpan berbagai peristiwa dan masalah yang dashyat, yang menimpa sebagian masyarakat kota sebagai konsekuensi pembangunan. Berbagai peristiwa dari yang mengharukan, menjengkelkan, sampai yang “menantang” muncul kepermukaan. Orang kota saling berebut memenangkan ”lomba-lomba menaklukkan kota. Kota seperti satu wilayah tak bertuan, tetapi penuh dengan janji-janji kebahagiaan dan kesejahteraan”. Ada kesan kuat bahwa realitas kota adalah realitas pergulatan kepentingan orang-orang, golongan, dan kelas-kelas sosial. Dalam persaingan, setidaknya ada yang menjadi korban. Banyaknya orang-orang yang berlomba-lomba dalam mencari peruntungan di kota, menjadikan persaingan yang tidak sehat. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan kesempatan kerja, akan menjadi pengangguran, dan itu merupakan

⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007. November 2007, h. 3.

juga salah satu penyebab kemiskinan yang terdapat diperkotaan.

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah serius bagi bangsa Indonesia. Untuk merespon masalah kemiskinan tersebut dibutuhkan perencanaan, anggaran, dan pengembangan program secara tepat. Di samping itu, diperlukan juga dukungan sistem koordinasi antarpemangku kepentingan yang selektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, yakni metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang sedang diteliti.⁹ Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah, studi kasus yang langsung dilakukan di lapangan (Field Research), yaitu terjun langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data primer.

Hasil dan Pembahasan

A. Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan

Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah Standart kelayakan dan mata pencaharian yang tidak menentu.

Program penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak pelita

pertama sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air. Upaya itu telah menghasilkan perkembangan yang positif namun demikian, krisis moneter dan ekonomi yang melanda indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut.

Krisis tersebut pada satu sisi telah menimbulkan lonjakan pengangguran dan dengan cepat meningkatkan kemiskinan dipedesaan dan perkotaan karena itu, krisis juga telah menyadarkan kita bahwa pendekatan yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan perlu dikoreksi atau diperkaya dengan upaya untuk mengokohkan keberdayaan institusi komunitas agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, dibutuhkan suatu program penanggulangan kemiskinan yang mampu memperluas prospek dan pilihan untuk dapat hidup dan berkembang dimasa depan, khususnya bagi masyarakat miskin diperkotaan. Program tersebut diperlukan untuk mendukung lebih lanjut program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan seperti IDT (Inpres Desa tertinggal) atau baru berjalan seperti PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang sasarannya di pedesaan.

Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pekerjaan Umum, telah melakukan berbagai upaya penanganan masalah kemiskinan di perkotaan. Salah satu diantaranya ialah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999. Pada awalnya dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagai akibat krisis ekonomi tahun 1997–

⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung : PT. Rosdakarya, 2004), h. 35.

1998 dan kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi.

Program yang dilaksanakan dipertanian ini menganut pendekatan pemberdayaan (empowerment) sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Kegiatan ini tidak hanya bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat dimasa mendatang.

Pendekatan P2KP dilandasi oleh kesadaran bahwa akar masalah kemiskinan dan kurangberhasilan dalam pembangunan adalah akibat kondisi masyarakat yang belum berdaya. Ketidakterdayaan tercermin dalam sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pemahaman terhadap akar penyebab masalah kemiskinan tersebut menyadarkan kita bahwa pendekatan dan cara penanggulangan kemiskinan yang bersifat parsial, sektoral dan charity mengakibatkan salah sasaran, menciptakan benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan modal sosial masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan dan lain-lain). Melemahnya modal sosial pada gilirannya mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara mandiri, bersama dan berkelanjutan.

Pengertian P2KP sendiri adalah program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar kedepannya masyarakat dapat menolong dirinya

sendiri.¹⁰ Pendekatan pemberdayaan dalam P2KP dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat sebagai embrio atau pondasi bagi terbentuknya kelembagaan lokal yang dapat menjadi lembaga perantara untuk dapat menjangkau lembaga formal. Untuk itu diperlukan partisipasi serta peran aktif pemerintah dalam pelaksanaan P2KP untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

Dari hasil pelaksanaannya, tampak perkembangan yang positif, khususnya dalam terwujudnya kelembagaan masyarakat lokal mandiri, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan ini dipercaya sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan sebagai pemeduli terhadap kemiskinan di komunitasnya. Membangun kelembagaan masyarakat yang mengakar perlu dilakukan, agar setelah masa program P2KP berakhir, upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat.

Meskipun demikian, evaluasi pelaksanaan P2KP maupun kajian refleksi kritis yang dilakukan secara intensif serta masukan-masukan dari berbagai pihak selama ini, disadari bahwa masih terdapat berbagai hal yang belum diakomodasi dalam konsep dan strategi pelaksanaan P2KP yang ada saat ini, sehingga memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut.

Penyempurnaan tersebut ditekankan pada keyakinan dasar P2KP bahwa persoalan kemiskinan sebenarnya hanya dapat ditanggulangi oleh masyarakat sendiri yang mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok

¹⁰ Tim Persiapan P2KP Pusat, Pedoman Umum Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), cet ke 2. (Jakarta: Sekretariat P2KP Pusat, 1999), h. 24.

peduli setempat. Sehingga cukup jelas bahwa faktor kapasitas dan kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah menempati posisi yang sangat strategis dalam penyiapan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan maupun pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman.

Guna mendukung peningkatan kapasitas dan kesiapan masyarakat tersebut, strategi pelaksanaan P2KP dititikberatkan pada proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat serta pemerintah daerah agar mampu melakukan proses transformasi sosial dari masyarakat miskin/tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya, dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri dan akhirnya dari masyarakat mandiri mampu menuju masyarakat madani (civil society).

Terwujudnya tatanan masyarakat madani inilah yang menjadi pondasi yang kokoh bagi terjaminnya kemandirian dan berkelanjutan upaya-upaya masyarakat, yang selain mampu menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara efektif, juga mampu membangun kondisi lingkungan permukiman di wilayahnya yang lebih baik, pro poor, sehat, dan lestari.¹¹

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

Permasalahan kemiskinan di Indonesia cukup kompleks. Fakta yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Pusat (BPS) per maret 2006. tercatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 39,05 juta jiwa atau 17,75 % dari jumlah penduduk. Angka pengangguran terbuka sebesar 10,9 juta jiwa atau 10,3 % dari total angkatan kerja (data BPS agustus 2006)

¹¹ Buku Pedoman P2KP-3. Oktober 2005. h. 1.

Peran serta pemerintah daerah (Pemda) dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Dalam memberikan PAKET (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) yang merupakan salah satu komponen Program P2KP sebagai suatu upaya proses pembelajaran untuk membangun dan melembagakan “kemitraan” antara masyarakat dengan pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli setempat (LSM, perguruan tinggi, pihak swasta, perbankan dan lain-lainnya) dalam rangka terwujudnya sinergi upaya penanggulangan kemiskinan.¹²

Melalui komponen PAKET diharapkan juga dapat terbangun dan melembaga proses konsultatif antara ketiga pilar pembangunan (pemerintah, masyarakat, swasta/kelompok peduli) di tingkat kota/kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, PAKET hanya sekedar stimulan untuk membantu dan mempercepat proses kemitraan yang mulai ditumbuhkan oleh masyarakat sendiri.

Bagi masyarakat, terutama BKM, komponen PAKET juga dimaksudkan sebagai proses pembelajaran untuk mengakses dan menggalang berbagai sumber daya maupun sumber dana yang dimiliki pemerintah kota/kabupaten atau kelompok peduli setempat (channeling), sehingga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan.¹³

Agar masyarakat (BKM) mampu bermitra dengan pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli setempat, maka prasyarat utama adalah masyarakat (BKM) memiliki kredibilitas

¹² Pedoman Umum P2KP-3. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Oktober 2005 h. 44.

¹³ Ibid h. 44

yang menjamin kepercayaan dari berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hanya BKM yang berdaya, yang memiliki peluang lebih besar untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses channeling dari program-program yang ada, khususnya melalui PAKET.

Komponen PAKET P2KP akan mengalokasikan dana stimulan yang dapat digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang direncanakan secara partisipatif serta diusulkan oleh BKM berdaya bekerjasama dengan dinas pemerintah kota/kabupaten atau sebaliknya. Selain itu, Program PAKET pada dasarnya harus ditempatkan sebagai sarana pembelajaran kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Dengan demikian, pelaksanaan dan capaian PAKET dapat dilihat pada kebutuhan rasa kebersamaan dan kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sumber dana terhadap kegiatan pembangunan di wilayahnya.¹⁴

Alokasi dana PAKET P2KP kepada pemerintah kota/kabupaten terseleksi akan dilakukan melalui mekanisme penganggaran yang biasa dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah kota/kabupaten. Jumlah alokasi dana PAKET untuk masing-masing kota/kabupaten diinformasikan secara terbuka, sehingga dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan. Jumlah dana PAKET yang telah dialokasikan untuk masing-masing kota/kabupaten sasaran tersebut merupakan jumlah maksimum yang dapat dimanfaatkan. Dana PAKET bersifat “stimulan” sebesar 30% sampai 50% dari

pendanaan kegiatan yang diusulkan dan dikelola oleh panitia kemitraan.

Dalam pemberdayaan ekonomi di masyarakat, P2KP memberikan masyarakat berupa bantuan modal usaha berupa dana pinjaman bergulir yang dapat diakses oleh masyarakat melalui KSM–KSM yang telah terbentuk. Dana-dana tersebut merupakan dana hibah untuk masyarakat yang dapat terus digulirkan secara berkelanjutan di masyarakat.

Masyarakat diberi berbagai pilihan untuk mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan ekonomi P2KP. Salah satunya, melalui pemberian pinjaman bergulir dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Pinjaman bergulir disediakan bagi kelompok masyarakat miskin yang memilih peluang bisnis menguntungkan dan kapasitas membayar memadai, Namun tidak mempunyai akses ke institusi kredit atau program lainnya.

Dikatakan bergulir karena dana untuk pinjaman ini terbatas. Karenanya, pemberian pinjaman oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) diberikan bergantian sesuai dengan ketersediaan dana. Jika dana belum mencukupi, KSM yang layak memperoleh pinjaman masuk dalam daftar tunggu. Selain itu, untuk dapat menggeliatkan perekonomian BKM. Maka dari dana yang dipinjam oleh masyarakat, dikenakan bunga sebesar 1-2%. Kegunaan bunga tersebut, selain untuk membantu biaya operasional BKM dapat juga untuk menambahkan modal usaha pinjaman bergulir pada masyarakat yang memerlukan.

C. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota Palangka Raya

¹⁴ Ibid. h 45

1) Program

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan memberdayakan masyarakat, khususnya kaum dhuafa atau masyarakat miskin. Gerakan penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan secara terpadu antara tiga pilar pembangunan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang berorientasi pada kemandirian dan berkelanjutan.

Pada dasarnya, tidak ada seorangpun didunia ini yang dilahirkan miskin atau kaya, kedua hal itu baru timbul kemudian melalui serentetan sebab akibat. Tidak jarang seseorang yang tinggal ditengah keluarga dilingkungan yang miskin dalam pertumbuhannya menjadi kaya, atau sebaliknya tidak jarang seseorang dilahirkan dari keluarga kaya kemudian hari menjadi miskin, itulah realitas kehidupan yang tidak dapat dipungkiri.

Secara sadar telah kita ketahui bersama, bahwa kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Karena tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan yang rendah tetapi juga berkenaan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan fisik yang rendah serta kurang mampu memberdayakan potensi sumber daya manusia dan alam yang terdapat disekelilingnya. Oleh karena itulah, upaya penanggulangan kemiskinan harus benar-benar dilaksanakan dengan komprehensif dan mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan dengan terpadu dan berkelanjutan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita dalam pembangunan untuk rakyat memadukan pertumbuhan dan pemerataan mengatakan bahwa stabilitas ekonomi, sosial dan politik, pertumbuhan penduduk yang terkendali dan lingkungan hidup

yang terjaga kelestariannya merupakan kondisi yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Karena program penanggulangan kemiskinan hanya dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila suasana tentram, aman, dan stabil telah tercipta.¹⁵

Strategi dasar gerakan pemberdayaan bagi masyarakat miskin diawali dengan perubahan perilaku individu maupun kolektif dengan cara membangun kesadaran kritis. Untuk itu, kelompok masyarakat miskin tidak boleh dipandang sebagai faktor penghambat pembangunan dan dimarjinalkan. Kaum miskin harus ditempatkan sebagai salah satu potensi yang sangat penting untuk diberdayakan dan dikembangkan ke arah yang lebih maju dan mandiri.

Salah satu wujud pembelajaran luar biasa yang dapat diambil dari kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan adalah bentuk sinergi antara masyarakat, pemerintah, swasta, LSM, perguruan tinggi serta kelompok peduli lainnya. Semua orang bisa ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan tanpa membedakan jenis kelamin dan usia. Bentuk bantuan pun tidak terbatas materi, tetapi bisa juga gagasan, partisipasi serta komitmen bersama.

Masyarakat diberi berbagai pilihan untuk mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan ekonomi P2KP. Salah satunya, melalui pemberian pinjaman bergulir dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Pinjaman bergulir disediakan bagi kelompok masyarakat miskin yang memilih peluang bisnis menguntungkan dan kapasitas membayar

¹⁵ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta:CIDES, 1996), h. 242.

memadai, Namun tidak mempunyai akses ke institusi kredit atau program lainnya.

Dikatakan bergulir karena dana untuk pinjaman ini terbatas. Karenanya, pemberian pinjaman oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) diberikan bergantian sesuai dengan ketersediaan dana. Jika dana belum mencukupi, KSM yang layak memperoleh pinjaman masuk dalam daftar tunggu.

Pembayaran kembali pinjaman merupakan syarat utama keberlangsungan pelayanan pinjaman. Semakin tertib peminjam membayar kembali serta semakin tinggi pembayaran kembali atau repayment rate UPK, maka semakin banyak KSM yang terlayani dan semakin besar jumlah pinjaman yang bisa diterima.

Dari sumber-sumber pendanaan yang didapatkan, komponen-komponen program digunakan untuk keperluan sebagai berikut : Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas dalam rangka mengedepankan Pemerintah Daerah. Dalam penggunaan biaya-biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah pada dasarnya didanai dari sumber dana Bank Dunia, yaitu berupa pendampingan tim fasilitator, lokakarya dan pelatihan masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kota/kabupaten juga mengalokasikan dana dari sumber APBN dan APBD masing-masing untuk beberapa kegiatan pelatihan dan lokakarya yang diperuntukkan bagi pengembang kapasitas para pihak yang ada di wilayah kerja masing-masing¹⁶

Selain itu, program-program yang mencakup lingkungan di masyarakat adalah BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada masyarakat miskin yang

langsung diterima oleh masyarakat tanpa adanya potongan sedikitpun. Melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), dana-dana yang didapat langsung masuk ke rekening bersama yang dimiliki oleh BKM, yang diwakilkan oleh tiga orang perwakilan pengurus/pemimpin kolektif BKM. Dana-dana tersebut sudah mendapatkan porsi bagian-bagian untuk langsung disalurkan kepada masyarakat yang berhak melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.

Proses pengolahan program atau proyek ini bersifat sentratik, karena pemerintah daerah hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan program (proyek) melalui alokasi dana dari pemerintah pusat. Dan yang diberikan pemerintah pusat diserahkan dan dicairkan kepada kelompok masyarakat dan tidak akan dikembalikan lagi kepada pemerintah. Dana ini menjadi dana abadi yang harus tetap bergulir didaerah perkotaan yang dijadikan sasaran proyek dan tidak dialihkan untuk kepentingan lain diluar wilayah sasaran proyek dan diluar kepentingan masyarakat. Dana yang diberikan adalah modal usaha untuk digunakan bagi kegiatan sosial ekonomi yang produktif yang diharapkan dapat menguntungkan, berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat mendapatkan bantuan berupa dana untuk modal usaha. Dana tersebut disalurkan dari BKM melalui KSM-KSM ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut merupakan ekonomi bergulir, dimana para KSM ekonomi peminjam mendapatkan bantuan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- minimal dan bisa lebih banyak untuk per orang per kepala keluarga. Dari dana tersebut, KSM penerima

¹⁶ Pedoman Umum P2KP-3, Hal 98

manfaat/pinjaman dapat menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan usahanya. Kemudian, KSM-KSM tersebut diberikan jangka waktu untuk dapat mengembalikan dana tersebut, untuk dapat digulirkan atau dipinjamkan kembali kepada penerima manfaat yang belum mendapatkannya. Biasanya, jangka waktu pengembalian dana tersebut selama 10 bulan. Dan dengan bunga sebesar 1–2 %. Bunga ini gunanya untuk memberikan pemasukan kepada BKM melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai dana intensif bagi juru tagih dari para peminjam.

2) Restrukturisasi

Dalam proses perkembangan yang terdapat didalam tubuh P2KP itu sendiri, pembelajaran yang terdapat pada tingkatan masyarakat sangat membantu dalam perbaikan dan perkembangan P2KP kedepannya. Arti restrukturisasi adalah perubahan–perubahan suatu struktur dimana hal–hal yang merupakan penghambat bagi keberhasilan suatu program perlu lebih disederhanakan dan atau perlu diperbaharui, agar pola berjalannya kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai.

Pada dasarnya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah Program Pemerintah Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan masyarakat di perkotaan. Maka dari itu, untuk menyelenggarakan Program tersebut, maka ditunjuk Departemen Pekerjaan Umum yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan berbagai instansi di tingkat pusat maupun daerah. Lebih dari itu, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ini dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melalui

proses pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah. Pemberdayaan ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak antara lain pemerintah, swasta, dan warga masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggungjawab dengan baik dalam memampukan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Dalam struktur organisasi yang ada, diperlukan adanya efisiensi struktur organisasi agar perencanaan dan kordinasi dapat berjalan lebih efektif, lancar, dan tidak berbelit–belit serta dapat menghemat waktu dan mempermudah pelaksanaan. Perlunya pengurangan dan pemangkasan birokrasi agar diharapkan dapat memperbaiki kinerja sebelumnya.

Seperti apabila dapat kita lihat pada bagan. Pada tingkatan propinsi, satker non-vertical PBL seharusnya dapat dihilangkan. Karena, dengan adanya struktur pada bagian tersebut. Maka dapat mengurangi beban pengendalian dan dapat menghemat yang ada. Sebaiknya, satker non vertical PBL tersebut disatukan atau dileburkan dengan Bapepeda Propinsi/PU propinsi. Karena, pada tingkatan propinsi keberadaan satker dalam memfasilitasi sangatlah lama. Apalagi bila keberadaan satker propinsi tersebut berada di Ibukota propinsi. Maka, untuk setiap kegiatan yang memerlukan difalitasi oleh satker propinsi, sangatlah banyak membuang energi dan waktu. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan dilapangannya tertunda karena lamanya proses berlangsung. Selanjutnya, untuk tingkatan kabupaten atau kota. Sebaiknya tetap diadakan, karena pada tingkatan tersebut merupakan koordinasi dan difasilitasi secara langsung pada tingkatan yang paling bawah.

Sebaiknya, satker pada tingkatan propinsi dapat dirangkap oleh satker pada tingkatan Kabupaten atau Kota. Hal ini

agar lebih dapat menyederhanakan birokrasi serta pengendalian dan memfasilitasi agar tidak berbelit-belit dan lebih efisien. Serta untuk dapat lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan program ini.

Selain itu, untuk tingkatan pada masyarakat. Sebaiknya peran serta perempuan dalam kepengurusan lembaga-lembaga yang ada agar lebih ditingkatkan dan ditambah jumlahnya. Bila pada sebelumnya jumlah perempuan dewasa minimal 30% dari jumlah penduduk. Maka sebaiknya jumlah tersebut dinaikkan menjadi 40%. Ini dimaksudkan agar peranan perempuan dimasyarakat dapat turut serta dalam pembangunan daerahnya. Karena dalam kenyataannya, wanita dapat lebih peka dalam menyikapi keadaan lingkungan disekitarnya. Selain daripada itu, perempuan bisa dapat lebih aktif ketimbang laki - laki karena wanita lebih banyak memiliki waktu luang dan perempuan dapat menjadi lebih cerdas, sehingga bisa dapat mandiri, lebih berdaya dalam mengelola rumah tangganya.

Kesimpulan

Hasil penelitian dilapangan, serta upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan maka peran P2KP dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin kota yaitu dengan cara pemberdayaan dan memberikan bantuan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, ternyata mendapatkan respon yang cukup baik. Selain tidak sulitnya untuk menerima bantuan tersebut, masyarakat juga diajak turut serta membangun lingkungannya.

Peran P2KP dalam memberdayakan masyarakat, sudah cukup berjalan baik. Meskipun dalam penerapannya dilapangan, masih ada kendala-kendala seperti sulitnya masyarakat untuk berkumpul dalam

pertemuan-pertemuan rutin serta masih tingginya individualisme masyarakat.

Referensi

- Adi, Isbandi Rukminto. (1994). *Psikologi Pekerjaan Sosial Dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*, Rineka Cipta: Jakarta
- Moleong, Lexy. J.. (2007). "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Rosdakarya
- Narwoko, Dwi. dan Bagong Suyanto, (2007). "*Sosiologi teks pengantar dan terapan*". Jaakarta: Kencana.
- Nurdin, M. Fadhil. (1990). *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Angkasa
- Hikmat, Harry. Dkk. (2005) *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Program Pemberdayaan Fakir Miskin tahun 2006 - 2010*. Jakarta: Departemen Sosial RI
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan untuk rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2002) *Teori - teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soehartono, Irawan. (2004). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (2006) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.